

Analisis Penerapan Aplikasi Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Web

Rosi Triastanti¹, Miftahul Hadi^{*2}

^{1, 2} Politeknik Keuangan Negara, STAN, Indonesia

Email: miftahulhadi@pknstan.ac.id^{*2}

**Corresponding Author*

Article Info

Article history:

Received: May 2026

Revised: June 2026

Accepted: July 2026

Keywords:

MonSAKTI

SAKTI

SPAN

Rekonsiliasi

Laporan Keuangan

Pemerintah

ABSTRAK

Transformasi digital dalam pengelolaan keuangan negara mendorong pemanfaatan sistem informasi terintegrasi guna meningkatkan efisiensi rekonsiliasi dan kualitas laporan keuangan pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan aplikasi Monitoring SAKTI (MonSAKTI) sebagai sistem rekonsiliasi dan penyusunan laporan keuangan berbasis web pada wilayah kerja KPPN Ruteng serta mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam implementasinya. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian merupakan pegawai yang memiliki kewenangan dan terlibat langsung dalam proses rekonsiliasi serta penyusunan laporan keuangan pada KPPN Ruteng. Data dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi MonSAKTI meningkatkan efisiensi proses rekonsiliasi melalui integrasi data antara SAKTI dan SPAN, percepatan identifikasi ketidaksesuaian transaksi, penyederhanaan proses rekonsiliasi, serta kemudahan penerbitan Surat Hasil Rekonsiliasi (SHR). Sistem ini turut mendukung peningkatan akurasi, transparansi, dan akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah. Namun demikian, implementasinya masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain keterbatasan kualitas jaringan internet, perbedaan kompetensi operator satuan kerja, permasalahan migrasi data, serta penyelesaian transaksi dalam konfirmasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi MonSAKTI tidak hanya ditentukan oleh teknologi yang digunakan, tetapi juga oleh kesiapan sumber daya manusia, dukungan infrastruktur, dan efektivitas koordinasi antarunit kerja.



1. PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel memerlukan sistem pelaporan keuangan yang andal. Dalam rangka mendukung prinsip good governance, pemerintah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual dan mengembangkan berbagai sistem informasi keuangan terintegrasi guna meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelaporan keuangan negara.

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi digital dalam pengelolaan keuangan pemerintah, termasuk melalui pengembangan sistem yang terintegrasi untuk mendukung proses transaksi, pelaporan, dan rekonsiliasi keuangan. Dalam ekosistem pengelolaan keuangan negara, Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) berfungsi sebagai aplikasi utama pengelolaan

transaksi dan akuntansi pada tingkat satuan kerja, sedangkan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) berperan sebagai sistem pengelolaan perbendaharaan pada tingkat Bendahara Umum Negara. Untuk mendukung proses monitoring, rekonsiliasi, dan penyusunan laporan keuangan secara terintegrasi, pemerintah mengembangkan Monitoring SAKTI (MonSAKTI) sebagai aplikasi berbasis web yang memanfaatkan data dari SAKTI dan SPAN.

Sebagai objek utama penelitian ini, MonSAKTI dirancang untuk meningkatkan efisiensi proses bisnis, mempercepat rekonsiliasi, mengurangi kesalahan manual, serta mendukung penyusunan laporan keuangan yang lebih akurat dan andal. Proses rekonsiliasi sendiri merupakan mekanisme penting untuk memastikan kesesuaian dan akurasi data yang disajikan kepada para pemangku kepentingan [1]. Selain itu, rekonsiliasi berperan dalam meminimalkan perbedaan antara data keuangan dan data barang sehingga validitas serta keandalan laporan keuangan dapat lebih terjaga [2]. Melalui fitur monitoring dan sinkronisasi data secara real-time, MonSAKTI membantu satuan kerja dan KPPN dalam mengidentifikasi serta menyelesaikan ketidaksesuaian data secara lebih cepat dan efektif [3].

Meskipun demikian, penerapan sistem keuangan berbasis digital masih menghadapi berbagai tantangan. Hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) menunjukkan masih adanya kelemahan dalam pengendalian data, penyelesaian selisih rekonsiliasi, dan pengelolaan transaksi resiprokal. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa optimalisasi penerapan sistem terintegrasi masih perlu ditingkatkan agar mampu menghasilkan laporan keuangan yang andal dan berkualitas. Selain faktor teknis, keberhasilan implementasi sistem juga dipengaruhi oleh pemahaman terhadap regulasi SAP serta kompetensi sumber daya manusia dalam menjalankan prosedur akuntansi berbasis akrual [4], [5].

Berbagai tantangan tersebut mendorong munculnya sejumlah penelitian yang mengkaji efektivitas rekonsiliasi dan implementasi sistem informasi keuangan pemerintah. Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa rekonsiliasi dan implementasi sistem informasi keuangan memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah. Setiawan dan Munandar [3] menjelaskan bahwa rekonsiliasi merupakan mekanisme penting untuk memastikan akurasi data transaksi serta meningkatkan ketepatan dan keandalan laporan keuangan pemerintah. Selain itu, pemanfaatan aplikasi berbasis digital dalam proses rekonsiliasi memungkinkan monitoring dan penyelesaian ketidaksesuaian data dilakukan secara lebih cepat dan efektif.

Penelitian Ambawarwati et al [6] menunjukkan bahwa rekonsiliasi berfungsi sebagai mekanisme pengendalian internal yang mendukung akurasi dan kualitas laporan keuangan pemerintah. Temuan serupa juga disampaikan oleh Oflagi et al. [7] yang menunjukkan bahwa penerapan rekonsiliasi melalui aplikasi e-Rekon membantu meningkatkan kesesuaian data dan akuntabilitas laporan keuangan. Namun, kedua penelitian tersebut dilakukan pada saat proses rekonsiliasi masih menggunakan aplikasi e-Rekon LK yang berbeda dengan sistem yang digunakan saat ini yaitu, MonSakti [8].

Perkembangan sistem informasi keuangan pemerintah selanjutnya ditandai dengan implementasi SAKTI dan integrasinya dengan SPAN. Penelitian Djuanda & Hamdani [9] menunjukkan bahwa penerapan konsep single database pada SAKTI mampu meningkatkan integrasi data dan efisiensi proses rekonsiliasi, meskipun masih ditemukan kendala berupa migrasi data, penyelesaian selisih rekonsiliasi, dan kesiapan sumber daya manusia. Penelitian lain oleh Anwar dan Hadi [10] juga menunjukkan bahwa integrasi SAKTI dan SPAN berkontribusi terhadap peningkatan akurasi pelaporan keuangan pada instansi pemerintah.

Meskipun demikian, kajian yang secara khusus menganalisis pemanfaatan MonSAKTI sebagai aplikasi rekonsiliasi dan penyusunan laporan keuangan berbasis web masih relatif terbatas, terutama pada wilayah dengan karakteristik geografis dan infrastruktur yang beragam. Padahal, MonSAKTI merupakan bagian penting dari transformasi digital pengelolaan keuangan negara yang menggantikan mekanisme rekonsiliasi sebelumnya. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis implementasi MonSAKTI serta mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam mendukung proses rekonsiliasi dan penyusunan laporan keuangan pada wilayah kerja KPPN Ruteng.

Dalam konteks tersebut, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) memiliki posisi strategis sebagai unit vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang menjalankan kewenangan perbendaharaan negara di daerah. Salah satu KPPN yang relevan untuk dikaji adalah KPPN Ruteng yang memiliki cakupan wilayah cukup luas di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan karakteristik geografis dan keterbatasan infrastruktur tertentu. Kondisi tersebut menjadikan implementasi sistem rekonsiliasi dan penyusunan laporan keuangan berbasis web di wilayah KPPN Ruteng menarik untuk dianalisis,

khususnya dalam melihat efektivitas sistem dalam mendukung pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

Meskipun implementasi SAKTI, SPAN, dan MonSAKTI telah banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya, sebagian besar penelitian berfokus pada aspek integrasi sistem, kualitas laporan keuangan, atau efektivitas aplikasi pada instansi pemerintah secara umum. Penelitian ini memberikan perspektif yang berbeda dengan menempatkan KPPN Ruteng sebagai objek kajian, yaitu wilayah kerja yang memiliki karakteristik geografis, infrastruktur, dan sebaran satuan kerja yang beragam. Selain menganalisis implementasi MonSAKTI, penelitian ini juga mengidentifikasi berbagai kendala operasional yang dihadapi dalam proses rekonsiliasi dan penyusunan laporan keuangan serta peran KPPN dalam melakukan pendampingan dan pembinaan kepada satuan kerja. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai implementasi sistem rekonsiliasi berbasis web pada wilayah dengan karakteristik yang berbeda dari pusat-pusat administrasi pemerintahan pada umumnya.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan aplikasi rekonsiliasi dan penyusunan laporan keuangan berbasis web pada satuan kerja wilayah KPPN Ruteng serta mengidentifikasi berbagai hambatan yang dihadapi dalam implementasinya.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Rekonsiliasi

Rekonsiliasi merupakan proses pencocokan dan penyesuaian data transaksi keuangan antar sistem maupun antar unit kerja untuk memastikan bahwa informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah telah akurat, lengkap, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam pengelolaan keuangan negara, rekonsiliasi menjadi bagian penting dari pengendalian internal guna meminimalkan kesalahan pencatatan, selisih data, maupun ketidaksesuaian transaksi yang dapat memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah. Selain itu, proses ini berfungsi untuk memitigasi risiko duplikasi data dan kesalahan entri yang sering terjadi pada sistem manual melalui integrasi database yang terpusat [11]. Lebih jauh, standarisasi melalui sistem informasi keuangan berperan dalam memitigasi tekanan isomorfisme koersif yang menuntut kepatuhan organisasi terhadap regulasi pusat demi menjaga legitimasi institusional [12], [13].

Pelaksanaan rekonsiliasi diperlukan karena sistem akuntansi pemerintah menganut konsep *Home Office and Branch Office* (HOB0), yaitu adanya pemisahan fungsi dan pencatatan antara kantor pusat dan unit-unit kerja di daerah [14]. Dalam konsep ini, transaksi keuangan dicatat oleh masing-masing entitas dengan sistem masing-masing sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan data apabila tidak dilakukan proses pencocokan secara berkala. Oleh karena itu, rekonsiliasi diperlukan untuk memastikan kesesuaian data antara satuan kerja dan Bendahara Umum Negara (BUN), sehingga laporan keuangan pemerintah dapat disusun secara transparan, akuntabel, dan andal. Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, sistem rekonsiliasi berbasis web, seperti e-Rekon LK, telah diimplementasikan untuk memudahkan proses pencocokan data transaksi di tingkat satuan kerja hingga kementerian/lembaga [15], [16]. Pada saat ini proses rekonsiliasi menggunakan aplikasi e-Rekon LK sudah digantikan dengan aplikasi MonSAKTI yang didukung data yang berasal dari aplikasi SAKTI dan SPAN.

Rekonsiliasi memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah serta memperkuat efektivitas pengendalian internal pada instansi pemerintah [6]. Implementasi sistem digital seperti MonSAKTI yang didukung data dari SAKTI dan SPAN semakin mendukung proses rekonsiliasi melalui sinkronisasi data dan monitoring transaksi secara *real-time*. Penggunaan aplikasi ini tidak hanya mempermudah pemantauan interkoneksi data secara sistematis, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen mitigasi terhadap potensi kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan [17].

2.2 Sistem Rekonsiliasi Berbasis Web

Transformasi digital dalam pengelolaan keuangan negara mendorong perubahan signifikan pada proses rekonsiliasi dan penyusunan laporan keuangan pemerintah. Pada KPPN Ruteng, perubahan

tersebut ditandai dengan implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yang terintegrasi dengan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) serta aplikasi Monitoring SAKTI (MonSAKTI). Integrasi ketiga sistem tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung proses rekonsiliasi dan pelaporan keuangan yang lebih efektif dan efisien.

Sebelum penerapan sistem terintegrasi berbasis web, proses rekonsiliasi dilakukan melalui mekanisme manual dengan pengunggahan Arsip Data Komputer (ADK) ke aplikasi e-Rekon dan LK. Mekanisme tersebut relatif memerlukan waktu lebih panjang karena setiap satuan kerja harus melakukan proses tutup buku terlebih dahulu sebelum data dapat direkonsiliasi. Selain itu, proses manual meningkatkan risiko keterlambatan, kesalahan input, dan ketidaksesuaian data antarsistem. Setelah implementasi SAKTI dan integrasinya dengan SPAN, proses rekonsiliasi menjadi lebih sederhana karena data transaksi yang diinput pada SAKTI dapat langsung terhubung dengan MonSAKTI secara otomatis dan real-time.

Implementasi sistem berbasis web ini menunjukkan adanya perubahan proses bisnis yang dalam pengelolaan keuangan pemerintah. Integrasi data memungkinkan proses pencocokan transaksi antara satker dan Bendahara Umum Negara (BUN) dilakukan lebih cepat tanpa memerlukan pertukaran data manual. Selain meningkatkan efisiensi operasional, sistem ini juga memperkuat kualitas pengendalian internal karena setiap ketidaksesuaian data dapat segera terdeteksi melalui menu to-do list pada MonSAKTI. Penelitian Gultom & Harahap [18] menemukan bahwa penerapan SAKTI mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses pelaporan keuangan. Penelitian terkait SAKTI juga menyatakan bahwa persepsi kepuasan dalam menggunakan SAKTI meningkatkan kinerja [19]. Sistem ini membantu pengguna dalam mempercepat penyusunan laporan serta meningkatkan produktivitas kerja. Sistem terintegrasi berbasis web juga mendukung peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah sebagai entitas publik membutuhkan sistem yang mampu menyediakan informasi keuangan secara cepat, akurat, dan andal guna menjaga kepercayaan serta legitimasi publik [20]. Oleh karena itu, penerapan sistem digital tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan efisiensi administratif, tetapi juga menjadi bagian penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

3. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai penerapan aplikasi rekonsiliasi dan penyusunan laporan keuangan berbasis web pada KPPN Ruteng. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis proses bisnis, implementasi sistem, serta berbagai kendala yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan pemerintah.

Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, wawancara, dan observasi. Sebuah pendekatan yang krusial dalam penelitian akuntansi pemerintahan untuk menangkap kompleksitas perilaku organisasi yang tidak dapat direduksi hanya dengan data kuantitatif [21], [22], [23]. Wawancara dilakukan kepada pegawai yang memiliki kewenangan dan terlibat langsung dalam proses rekonsiliasi serta penyusunan laporan keuangan pada KPPN Ruteng. Pemilihan informan dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan tingkat keterlibatan dan pemahaman mereka terhadap penerapan sistem. Observasi dilakukan terhadap pelaksanaan rekonsiliasi dan penyusunan laporan keuangan menggunakan aplikasi MonSAKTI, sedangkan studi kepustakaan dilakukan melalui penelaahan peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, serta dokumen pendukung yang relevan. Selain itu, penelitian juga memanfaatkan dokumentasi berupa laporan rekonsiliasi dan Surat Hasil Rekonsiliasi (SHR) sebagai data pendukung.

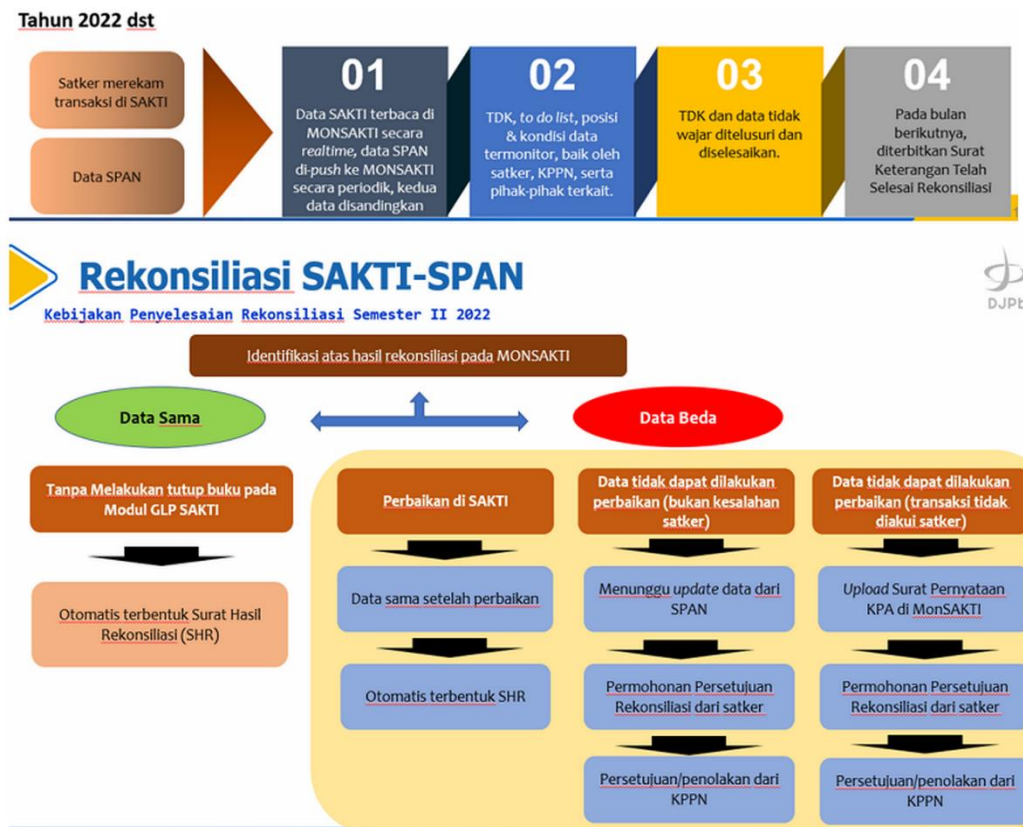
Objek penelitian adalah KPPN Ruteng sebagai unit vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang membawahi satuan kerja di wilayah Kabupaten Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, dan Ngada. Pemilihan objek penelitian didasarkan pada karakteristik wilayah kerja yang cukup luas dengan kondisi geografis dan infrastruktur yang beragam sehingga relevan untuk menganalisis efektivitas penerapan sistem rekonsiliasi dan pelaporan keuangan berbasis web.

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk meningkatkan kredibilitas hasil penelitian, dilakukan triangulasi dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dokumentasi, dan ketentuan peraturan yang berlaku.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

41. Proses Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaksanaan rekonsiliasi dilakukan secara periodik dengan membandingkan data transaksi keuangan antara sistem SAKTI pada tingkat satuan kerja dengan data pada SPAN selaku sistem pengelolaan keuangan Bendahara Umum Negara. Rekonsiliasi dilakukan terhadap beberapa elemen data penting, antara lain pagu anggaran, realisasi pendapatan, pengembalian pendapatan, realisasi belanja, pengembalian belanja, kas bendahara, piutang, persediaan, serta aset tetap. Gambaran proses rekonsiliasi pada pemerintah pusat dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Proses Rekonsiliasi dalam MonSAKTI

Perubahan paling menonjol dari aplikasi yang saat ini digunakan dengan aplikasi sebelumnya terletak pada otomatisasi alur data. Saat ini, setiap data transaksi yang diinput oleh satuan kerja (satker) ke dalam SAKTI secara otomatis akan terintegrasi ke dalam aplikasi MonSAKTI. Di sisi lain, data dari SPAN juga dapat langsung di-push ke dalam aplikasi MonSAKTI sehingga data yang dihasilkan dari dua sistem dapat dilakukan pencocokan di satu aplikasi.

Perbedaan signifikan lainnya adalah kemudahan penerbitan SHR. Dulu, penerbitan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) memerlukan proses tutup buku dan pencetakan, kemudian ditandatangani oleh Kepala Seksi Vera dan Kepala KPPN. Kini, SHR dapat langsung diterbitkan selama data antara SAKTI dan SPAN sudah cocok, menghilangkan tahapan manual yang memakan waktu dan riskan akan kelalaian. Dapat disimpulkan bahwa implementasi sistem berbasis web (MonSakti) memberikan kemudahan dalam penerbitan Surat Hasil Rekonsiliasi (SHR).

Selain fokus pada transaksi keuangan, proses rekonsiliasi yang dilakukan oleh KPPN Ruteng juga mencakup data terkait Barang Milik Negara (BMN). Rekonsiliasi BMN ini dilakukan untuk

memastikan bahwa catatan aset pemerintah akurat, lengkap, dan sesuai dengan kondisi fisiknya, serta mematuhi standar akuntansi pemerintah. Rekonsiliasi BMN secara spesifik meliputi tiga kategori utama yaitu mutasi masuk BMN, mutasi keluar BMN dan perubahan (koreksi dan penyesuaian) BMN.

Transformasi proses rekonsiliasi ini secara keseluruhan tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional KPPN Ruteng, tetapi juga memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. Lebih lanjut, berdasarkan wawancara dengan satker, adanya aplikasi berbasis web yang diterapkan membuat proses rekonsiliasi menjadi lebih menghemat waktu, lebih sederhana, dan dapat menghasilkan laporan keuangan yang akurat. Hal ini diperkuat oleh pernyataan narasumber: “Saat MonSAKTI diterapkan ada beberapa perubahan yang terjadi, salah satunya adalah *“to-do-list”* dimana *“to-do-list”* harus diselesaikan oleh Satuan Kerja untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat. Selain itu, penerapan aplikasi rekonsiliasi LK membuat proses rekonsiliasi menjadi lebih hemat waktu dan lebih sederhana”. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa penggunaan sistem terintegrasi berperan krusial dalam meminimalisasi kendala teknis serta menjamin kesesuaian dan kebenaran data transaksi secara sistematis [9]. Temuan tersebut tidak hanya menunjukkan perubahan teknis dalam proses rekonsiliasi, tetapi juga mencerminkan perubahan kelembagaan dalam tata kelola keuangan pemerintah yang dapat dianalisis melalui perspektif teori institusional dan legitimasi.

4.2 Analisis Penerapan Sistem dalam Perspektif Teori Institusional dan Legitimasi

Menurut DiMaggio dan Powell [24], organisasi cenderung mengadopsi praktik dan sistem tertentu sebagai respons terhadap tekanan regulasi serta tuntutan lingkungan kelembagaan. Dalam konteks pengelolaan keuangan negara, implementasi SAKTI, SPAN, dan MonSAKTI dapat dipandang sebagai bentuk coercive isomorphism yang muncul akibat kebijakan pemerintah untuk menstandarisasi proses pengelolaan dan pelaporan keuangan pada seluruh instansi pemerintah. Kewajiban penggunaan sistem yang terintegrasi tersebut mendorong satuan kerja, termasuk pada wilayah KPPN Ruteng, untuk menerapkan prosedur rekonsiliasi dan pelaporan keuangan yang seragam sehingga mendukung konsistensi data serta memudahkan proses konsolidasi laporan keuangan pemerintah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan MonSAKTI membantu satuan kerja dan KPPN dalam melakukan monitoring transaksi serta mengidentifikasi ketidaksesuaian data secara lebih cepat melalui mekanisme rekonsiliasi yang terintegrasi. Standardisasi proses bisnis melalui sistem yang sama pada seluruh satuan kerja juga mencerminkan adanya tekanan normatif untuk menerapkan praktik pengelolaan keuangan yang lebih modern, efektif, dan berbasis teknologi informasi. Temuan ini sejalan dengan Ardyanto et al. [25] yang menyatakan bahwa implementasi sistem keuangan melalui aplikasi SAKTI berkontribusi terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah melalui proses pengelolaan data yang lebih terintegrasi dan akuntabel.

Dari perspektif Teori Legitimasi, implementasi MonSAKTI tidak hanya berfungsi sebagai sarana administratif, tetapi juga menjadi instrumen untuk memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara. Damayanti et al. [26] menjelaskan bahwa sistem informasi dan praktik akuntansi berperan penting dalam membangun akuntabilitas melalui penyediaan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan kepada para pemangku kepentingan. Integrasi data antara SAKTI, SPAN, dan MonSAKTI memungkinkan proses rekonsiliasi dilakukan secara lebih cepat, terdokumentasi, dan transparan sehingga dapat meminimalkan kesalahan pencatatan maupun perbedaan data antar entitas pelaporan. Selain itu, keberhasilan implementasi sistem juga dipengaruhi oleh kompetensi sumber daya manusia dan efektivitas pengendalian internal sebagaimana dikemukakan oleh Hakim dan Kusumah [27]. Dengan demikian, penerapan sistem terintegrasi tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga mendukung terwujudnya pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel, transparan, dan terpercaya. Meskipun memberikan berbagai manfaat dalam mendukung standardisasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, implementasi MonSAKTI pada praktiknya masih menghadapi sejumlah kendala operasional.

4.3 Hambatan dan Kendala Implementasi Sistem

Meskipun penerapan MonSAKTI memberikan berbagai kemudahan dalam proses rekonsiliasi dan penyusunan laporan keuangan, penelitian ini menemukan bahwa implementasinya masih menghadapi sejumlah kendala operasional. Hambatan yang paling menonjol adalah keterbatasan kualitas jaringan internet pada beberapa wilayah kerja KPPN Ruteng. Kondisi geografis yang cukup beragam menyebabkan akses internet belum merata sehingga proses sinkronisasi data dan penggunaan aplikasi berbasis web tidak selalu berjalan optimal. Dalam beberapa kasus, satuan kerja harus mencari lokasi dengan akses internet yang lebih stabil atau datang langsung ke KPPN untuk menyelesaikan proses rekonsiliasi dan pelaporan keuangan.

Selain faktor infrastruktur, perbedaan tingkat pemahaman operator satuan kerja juga menjadi tantangan dalam pelaksanaan rekonsiliasi. Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa tidak seluruh operator memiliki tingkat penguasaan yang sama terhadap penggunaan aplikasi SAKTI maupun prosedur rekonsiliasi keuangan pemerintah. Kondisi ini menyebabkan masih ditemukannya kesalahan pencatatan transaksi, ketidaksesuaian penggunaan akun, serta keterlambatan dalam menindaklanjuti transaksi dalam konfirmasi (TDK). Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa kompetensi pengguna merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi keberhasilan implementasi sistem informasi keuangan pemerintah [28].

Kendala lain yang ditemukan berkaitan dengan proses pendetailan aset tetap dan Barang Milik Negara (BMN). Pada beberapa satuan kerja, perubahan kode aset akibat kesalahan penggunaan akun pada saat pencatatan awal memerlukan proses koreksi yang cukup kompleks karena harus diikuti dengan penyesuaian data aset dan revisi administrasi pendukung. Kondisi tersebut berpotensi menambah waktu penyelesaian rekonsiliasi apabila tidak segera ditindaklanjuti melalui koordinasi antara satuan kerja dan KPPN.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi MonSAKTI tidak hanya ditentukan oleh kemampuan teknologi yang digunakan, tetapi juga oleh kesiapan sumber daya manusia, kualitas infrastruktur pendukung, serta efektivitas koordinasi antara KPPN dan satuan kerja. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi pengguna, penguatan fungsi pendampingan, serta perbaikan infrastruktur teknologi informasi perlu terus dilakukan untuk mendukung proses rekonsiliasi dan penyusunan laporan keuangan yang lebih efektif, akurat, dan akuntabel.

5. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan MonSAKTI sebagai aplikasi rekonsiliasi dan penyusunan laporan keuangan berbasis web telah meningkatkan efisiensi proses rekonsiliasi pada satuan kerja wilayah KPPN Ruteng. Efisiensi tersebut tercermin dari proses monitoring data yang lebih terintegrasi, percepatan identifikasi ketidaksesuaian data, penyederhanaan proses rekonsiliasi, serta kemudahan penerbitan Surat Hasil Rekonsiliasi (SHR) dibandingkan mekanisme sebelumnya yang masih mengandalkan proses manual dan pertukaran data secara terpisah.

Meskipun demikian, implementasi MonSAKTI masih menghadapi beberapa kendala. Hambatan yang paling menonjol adalah keterbatasan infrastruktur jaringan pada beberapa wilayah kerja, perbedaan tingkat pemahaman dan kompetensi operator satuan kerja, serta perlunya penyelesaian transaksi dalam konfirmasi dan ketidaksesuaian data secara berkelanjutan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi sistem tidak hanya ditentukan oleh teknologi yang digunakan, tetapi juga oleh kesiapan sumber daya manusia dan dukungan infrastruktur yang memadai.

Berdasarkan temuan tersebut, prioritas yang perlu dilakukan adalah penguatan kapasitas pengguna melalui pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan, peningkatan koordinasi antara KPPN dan satuan kerja dalam penyelesaian permasalahan rekonsiliasi, serta optimalisasi dukungan infrastruktur teknologi informasi untuk memastikan implementasi MonSAKTI dapat berjalan secara lebih efektif dan mendukung penyusunan laporan keuangan pemerintah yang akurat, transparan, dan akuntabel.

6. KETERBATASAN & SARAN

Penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian hanya dilakukan pada satu objek penelitian, yaitu KPPN Ruteng, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan untuk seluruh KPPN di Indonesia. Kedua, penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif sehingga belum mengukur secara kuantitatif efektivitas penerapan sistem rekonsiliasi dan penyusunan laporan keuangan berbasis web. Ketiga, penelitian masih berfokus pada proses implementasi sistem dan belum membahas secara mendalam pengaruh penerapan sistem terhadap kualitas laporan keuangan maupun kepuasan pengguna aplikasi. Keempat, penelitian ini menggunakan triangulasi melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian selanjutnya dapat memperluas proses triangulasi melalui penambahan jumlah informan dan cakupan wilayah penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian, KPPN Ruteng dan satuan kerja di wilayahnya perlu terus meningkatkan kompetensi operator melalui pelatihan dan pendampingan terkait penggunaan aplikasi SAKTI dan MonSAKTI. Selain itu, pemerintah juga perlu memperkuat infrastruktur teknologi informasi,

khususnya kualitas jaringan internet, agar proses rekonsiliasi dan penyusunan laporan keuangan dapat berjalan lebih optimal. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan metode kuantitatif atau model evaluasi sistem informasi agar hasil penelitian menjadi lebih komprehensif dan terukur.

REFERENSI

- [1] S. Martadinata, "Akuntansi Sektor Publik di Indonesia," *Jurnal Inovasi Global*, vol. 2, no. 6, pp. 620–624, 2024, doi: 10.58344/jig.v2i6.106.
- [2] R. Aminy, E. Pituringsih, and E. Widiastuty, "Analisis Penerapan Good Governance, Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Sistem Akuntansi Instansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan," *Valid Jurnal Ilmiah*, vol. 18, no. 2, pp. 136–147, 2021, doi: 10.53512/valid.v18i2.181.
- [3] Y. Setiawan and A. Munandar, "Aplikasi MonSAKTI: Kunci Menuju Laporan Keuangan Pemerintah yang Berkualitas," *INOVASI*, vol. 12, no. 1, pp. 327–337, Jun. 2025, doi: 10.32493/INOVASI.V12I1.P327-337.46969.
- [4] M. A. Arifin, "Standar Akuntansi Pemerintah dalam Mewujudkan Good Government Governance," *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, vol. 13, no. 4, 2019, doi: 10.31851/jmwe.v13i4.2705.
- [5] R. R. P. Djawang, A. Made, and A. R. Sari, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah," *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, vol. 7, no. 2, 2020, doi: 10.21067/jrma.v7i2.4257.
- [6] R. D. Ambarwati, R. A. Qadri, and M. Hadi, "Tjokro-[ism] Case Study: Reconciling the Tangled-Thread of Cash Management Practice in Treasury Accounting Field," *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, vol. 14, no. 2, pp. 150–169, Oct. 2021, doi: 10.35448/JRAT.V14I2.12195.
- [7] J. Gabril Oflagi, H. Manossoh, and S. Kho Walandouw, "Analisis Aplikasi E-Rekon-LK terhadap Rekonsiliasi Laporan Keuangan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Provinsi Utara," *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, vol. 13, no. 02, pp. 693–704, Jun. 2018, Accessed: Jun. 25, 2026. [Online]. Available: <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/gc/article/view/19929>
- [8] "Pentingnya Rekonsiliasi Monsakti bagi Laporan Keuangan yang Berkualitas." Accessed: Jun. 25, 2026. [Online]. Available: <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/benteng/id/data-publikasi/artikel/2990-pentingnya-rekonsiliasi-monsakti-bagi-laporan-keuangan-yang-berkualitas.html>
- [9] M. A. Djuanda and R. Hamdani, "Penerapan Aplikasi Laporan Keuangan di Kementerian Indonesia: Rekonsiliasi Single Database SAKTI," *Kompak: Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, vol. 16, no. 1, pp. 52–60, 2023, doi: 10.51903/kompak.v16i1.1041.
- [10] A. I. Anwar and M. Hadi, "Implementasi Aplikasi Sakti dan Span Dalam Penyusunan Laporan Keuangan," *Jurnal Informatika*, vol. 1, no. 2, pp. 32–55, 2022, doi: 10.57094/ji.v1i2.359.
- [11] M. Azkar, "To Use WEB-Based Integrated Applications Through the Agency Level Financial Application System (SAKTI) for the Function of State Financial Management (Case Study on the APBN Work Unit in the Regional Office of the Ministry of Religion)," *International Journal of Policy and Public Administration*, vol. 4, no. 2, pp. 97–108, 2023, doi: 10.33369/ispaj.v4i2.29169.
- [12] E. Setiawan, A. Juanda, and D. Leniwati, "Accrual-Based Accountability of Budgeting Realization Report in a Government Institution," *Journal of Economic Sciences*, vol. 2, no. 6, pp. 432–442, 2025, doi: 10.62885/ekuisi.v2i6.748.
- [13] A. T. Jonathan, K. Aswar, and Ermawati, "The Implementation of Accrual Basis Accounting in Indonesian Local Government," *Journal of Economics and Behavioral Studies*, vol. 12, pp. 67–72, 2020, doi: 10.22610/jeb.v12i4(j).3048.
- [14] Pemerintah Indonesia, *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat*. Indonesia, 2022.
- [15] J. G. Oflagi, H. Manossoh, and S. K. Walandouw, "Analisis Aplikasi E-Rekon-LK terhadap Rekonsiliasi Laporan Keuangan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Provinsi Utara," *Going Concern Jurnal Riset Akuntansi*, vol. 13, no. 2, 2018, doi: 10.32400/gc.13.02.19929.2018.
- [16] V. A. Prakoso, N. M. D. Ratnadi, and I. A. D. Putri, "Pengaruh Kompetensi dan Budaya Organisasi pada Kinerja Penyusun Laporan Keuangan Satuan Kerja melalui Komitmen Organisasi," *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, p. 2789, 2017, doi: 10.24843/eeb.2017.v06.i07.p07.

- [17] M. R. Saragih and R. Aritonang, "Pengaruh Harapan Kinerja, Harapan Usaha, Pengaruh Sosial, Fasilitas Kondisi terhadap Tingkat Penggunaan Monsakti sebagai Aplikasi Penyusunan Laporan Keuangan di Direktorat PAUD Dikdasmen," *Jurnal Sosial dan Sains*, vol. 5, no. 5, pp. 1485–1497, 2025, doi: 10.59188/jurnalsosains.v5i5.32130.
- [18] C. M. J. Gultom and S. N. Harahap, "Implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja Pemerintah," *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, vol. 8, no. 1, pp. 300–313, 2024, doi: 10.33395/owner.v8i1.1846.
- [19] M. Hadi, R. D. Ambarwati, H. Sugiyanto, and A. Khuluq, "Determinant Analysis of SAKTI Implementation (Delone and Mclean Information System Success Model Approach)," *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, vol. 9, no. 2, pp. 207–221, 2024, doi: <https://doi.org/10.23917/reaksi.v9i2.5429>.
- [20] M. C. Suchman, "Managing Legitimacy: Strategic and Institutional Approaches," *Academy of Management Review*, vol. 20, no. 3, pp. 571–610, 1995, doi: 10.2307/258788.
- [21] G. Bucior and A. Zurawik, "The Autonomy of Public Sector Units in the Process of Formulating Accounting Policy – Evidence from Poland," *European Research Studies Journal*, pp. 555–581, 2022, doi: 10.35808/ersj/3050.
- [22] S. G. Mauro, L. Cinquini, and D. Pianezzi, "New Public Management between reality and illusion: Analysing the validity of performance-based budgeting," *The British Accounting Review*, vol. 53, no. 6, p. 100825, 2019, doi: 10.1016/j.bar.2019.02.007.
- [23] D. Chow, R. Pollanen, R. F. Baskerville, C. A. Pontoppidan, and R. E. Day, "Usefulness of consolidated government accounts: A comparative study," *Public Money & Management*, vol. 39, no. 3, pp. 175–185, 2018, doi: 10.1080/09540962.2018.1535034.
- [24] P. J. DiMaggio and W. W. Powell, "The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields," *Am. Sociol. Rev.*, vol. 48, no. 2, p. 147, 1983, doi: 10.2307/2095101.
- [25] D. Ardyanto, I. K. Subagja, and A. Hakim, "Implementasi Sistem Keuangan terhadap Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan di Kementrian Pertahanan melalui Aplikasi Sakti," *Journal of Accounting and Finance Management*, vol. 6, no. 5, pp. 2773–2780, 2025, doi: 10.38035/jafm.v6i5.2829.
- [26] R. A. Damayanti, S. Syarifuddin, D. Darmawati, and A. Indrijawati, "[Re]Konstruksi Akuntabilitas: Sebuah Tinjauan Akuntansi dan Sistem Informasi dari Perspektif Lokal," *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, vol. 17, no. 2, 2013, doi: 10.24034/j25485024.y2013.v17.i2.158.
- [27] F. Hakim and R. W. Kusumah, "Pengaruh Implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah Lingkup Badan Pusat Statistik," *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, vol. 9, no. 1, pp. 2050–2070, 2025, doi: 10.31955/mea.v9i1.5360.
- [28] B. M. L. Ndate, H. Herdi, T. F. Q. Patty, and M. N. Ice, "Analisis penerapan standar akuntansi pemerintah dalam penyusunan laporan keuangan," *Journal of Accounting and Digital Finance*, vol. 5, no. 3, pp. 395–410, 2025, doi: 10.53088/jadfi.v5i3.2435.